
Pengaruh PAD Dan DAU Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)

Dhiah Novita¹, Ayunda Putri Nilasari²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Magelang,
Indonesia

dhiahnovi@gmail.com¹, ayundaputri@untidar.ac.id²

Abstract

This research aims to determine the effect of local revenue and general allocation funds on direct expenditures in districts/cities of Central Java Province. The research method used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis, and the coefficient of determination test. The results showed that partially the local original income and general allocation funds variables affected direct expenditure in districts/cities of Central Java Province. Simultaneously, the variables of local revenue and general allocation funds have an effect on direct spending in districts/cities of Central Java Province.

Keywords: *direct expenditure, general allocation fund, local revenue.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah pada masa reformasi sangat krusial untuk diaplikasikan serta ditingkatkan, karena pembangunan wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan global, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dengan prinsip swatantra daerah. Amanat UU supaya setiap pemerintah daerah melaksanakan pembangunan yang lebih merata dan seimbang. Daerah otonom memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kekrusialan warga berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan tanggung jawab (akuntabilitas) (Setiyawati, 2014).

Otonomi daerah yang diberikan akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah karena memungkinkan secara bebas merumuskan sendiri rencana keuangan dan merumuskan kebijakan yang mempengaruhi pembangunan daerah.. Pendapatan asli daerah diharuskan untuk selalu mendorong pertumbuhan (Rizal, 2017). Tujuannya yaitu memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyediakan dana untuk melaksanakan kemandirian daerah berdasarkan keandalan daerah demi mewujudkan sentralisasi. (Muhtarom, 2015) menyatakan bahwa pendapatan

asli daerah harus mendukung kapasitas fiskal suatu wilayah. PAD juga disebut sebagai penghasilan yang diperoleh suatu wilayah sesuai dengan peraturan berlaku pada suatu daerah dalam menghimpun modal bagi kegiatan di sektor yang bersangkutan (Rizanda, 2013). Menurut UU No. 33 tahun 2004, sumber PAD berasal dari: (a) retribusi dan pajak daerah; (b) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (c) lain-lain PAD yang sah.. Pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah yang menjadi ukuran paling utama untuk mengukur keahlian suatu wilayah supaya otonomi daerah dapat terlaksana dan terwujud (Setiyawati, 2014). Berikut merupakan data pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019:

Tabel 1 PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2013	14.303.633.279.508
2014	18.764.753.609.619
2015	20.698.442.504.086
2016	22.747.773.353.248
2017	26.945.325.899.152
2018	26.766.784.043.017
2019	28.648.041.587.526

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Pada tabel 1 terlihat bahwa pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terlihat pada tahun 2018 yaitu Rp 26.766.784.043.017. Besarnya PAD yang didapatkan pada suatu daerah dapat meningkatkan alokasi belanja langsung. Penerimaan pajak daerah menyebabkan naik turunnya nilai pendapatan asli daerah.

Berdasar UU No. 33 Tahun 2004, dana alokasi generi merupakan modal yang diberikan oleh pusat kepada daerah bertujuan untuk mendistribusikan kapabilitas keuangan secara adil antar sektor untuk menyediakan dana bagi keperluan distrik dalam melakukan desentralisasi. DAU bertujuan dalam mewujudkan keadilan perpajakan antar pemerintah yang nilainya telah diatur serta ditransfer ke masing-masing pemerintah daerah pada saat digunakan (Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, 2018). Dana alokasi umum diberikan melalui

penerimaan dalam negeri dalam rangka mencapai pemerataan fiskal antar daerah dan untuk memberikan dana pada keperluan belanja dalam hal melaksanakan sentralisasi yang diperoleh dari pusat (Made Ari Juniawan, 2018). Biaya didistribusikan ke provinsi (10%) dan kabupaten/kota (90%). DAU merupakan dana hibah yang penggunaannya tergantung pada prioritas daerah dan keperluan dalam peningkatan layanan publik dalam melakukan swatantra wilayah.

Dalam (Permendagri No. 13 Tahun 2006) belanja langsung adalah anggaran berkaitan langsung dengan pengimplementasian rencana dan kegiatan sektor pemerintah selama periode akuntansi. Belanja langsung ditandai dengan kemampuan untuk mengukur input yang ditentukan (alokasi belanja) dan membandingkannya dengan output yang dihasilkan (Rahmat, 2016). Belanja langsung menurut jenis belanja, antara lain belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa.

Pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemandirian daerah, mengoptimalkan potensi pendapatan berupa dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, dan sebagainya. Karena kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah perlu mengalokasikan lebih banyak pengeluaran, dalam hal ini berkaitan kuat dengan belanja langsung, seperti pembelian barang dan jasa dalam pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya. Namun di Provinsi Jawa Tengah masih terjadi ketimpangan distribusi pelayanan di kota/wilayah didaerah tertinggal atau desa pelosok yang memberikan pelayanan berupa fasilitas umum, pemeliharaan (perbaikan) dan pembangunan jalan, serta daerah-daerah tersebut masih kekurangan fasilitas yang disediakan pemerintah. Sehingga PAD dan DAU berperan penting dalam mengalokasikan pengeluaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang antara hubungan kedua faktor tersebut dengan belanja langsung.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk memahami pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, (2) untuk melihat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, dan (3) untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Jawa

Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja langsung pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2019.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam pengambilan sampel. Alasan pemilihan sampel adalah ke enam wilayah tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang bervariasi (berbeda-beda).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan data kuantitatif yaitu data realisasi anggaran tahunan yang dipublikasikan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Sumber data yang dipakai yaitu data sekunder yang diperoleh pada www.djpk.kemenkeu.go.id memuat data realisasi anggaran untuk data pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, serta belanja langsung.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Metode ini digunakan dengan mengumpulkan data realisasi anggaran pada tahun 2013-2019.

Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penulisan ialah belanja langsung. Variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.

Metode Analisis Data

- (1) Uji Asumsi Klasik
 - (a) Uji Normalitas

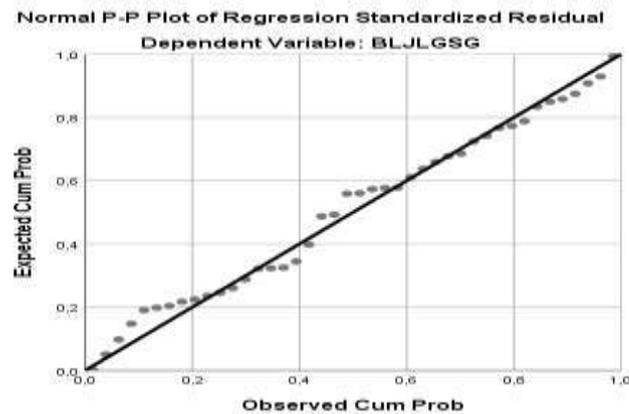
Digunakan dalam membuktikan apakah variabel pengganggu dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

- (b) Uji Heteroskedastisitas
Digunakan untuk memeriksa dalam sebuah regresi terjadi ketidaksesuaian varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Syarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).
- (c) Uji Multikolinearitas
Digunakan untuk membuktikan ada tidaknya yang memiliki kemiripan antar variabel bebas dalam suatu model (Ghozali, 2011). Penelitian yang baik adalah tidak terdapat gejala multikolinearitas.
- (d) Uji Autokorelasi
Menurut (Ghozali, 2011) tujuan autokorelasi adalah untuk menguji kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya.
- (2) Uji Kelayakan Model
- (a) Uji t
Dipakai untuk menyelidiki secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen.
- (b) Uji F
Bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan (bersamaan).
- (c) Uji R^2 (Koefisien Determinasi)
Mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen.
- (3) Analisis Regresi Linear Berganda
Digunakan untuk memprediksi seberapa besar nilai variabel akan berubah jika nilai variabel lain dilakukan manipulasi/dioperasikan (naik turun).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1 Grafik Normal P-P Plot

Dari gambar 1, memperlihatkan bahwa sebaran titik menyebar diarea histogramnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut berdistribusi normal dan memenuhi uji normalitas. Untuk memperkuat hasil tersebut, dapat menggunakan uji statistik yaitu uji *One Sample Kolmogrov-Smirnov*.

Tabel 2 Hasil Uji *One Sample Kolmogrov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000930
	Std. Deviation	147221010723,89706000
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,064
	Negative	-,089
Test Statistic		,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

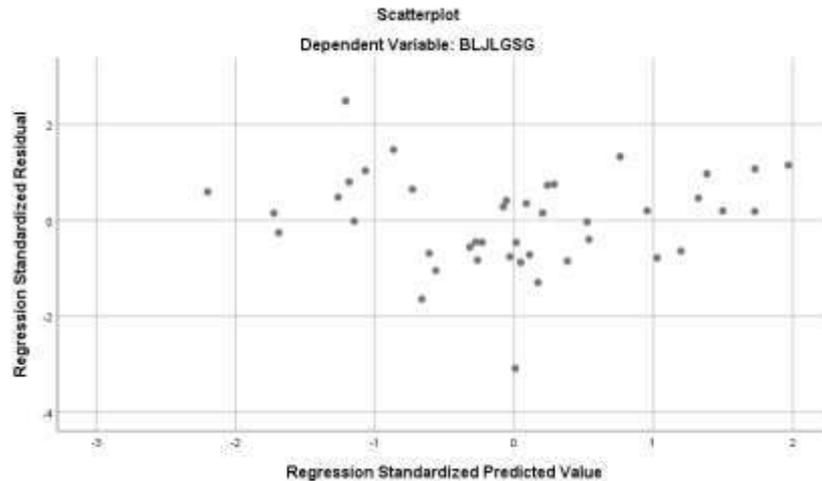
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Pada tabel 2 tersebut, menunjukkan bahwa nilai Kolmogrov-Smirnov $0,200 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa signifikansi residualnya berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa sebaran titik-titik tidak membentuk suatu pola/alur tertentu, sehingga dapat dinyatakan bahwa bentuk regresi terbebas dari heteroskedastisitas

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
		T	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	,730	,470			
	PAD	5,933	,000	,882	1,134	
	DAU	3,208	,003	,882	1,134	

a. Dependent Variable: BLJLGSG

Dari hasil pengujian pada tabel 3 tersebut, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* PAD dan DAU sebesar $0,882 > 0,1$. Sedangkan nilai VIF PAD dan DAU sebesar $1,134 < 10$. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa model regresi terhindar dari gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,794 ^a	,630	,611	15094871483 8,22840	1,739

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BLJLGSG

Pada tabel 4, terlihat nilai Durbin-Watson 1,739 yang kemudian akan dibandingkan dengan nilai tabel yang diperoleh dari nilai signifikansi 5% jumlah sampel 42 (n) dan jumlah variabel bebas 2 (k=2). Hasil tabel hitung DW untuk $dL = 1,4073$ dan $dU = 1,6061$ serta poin $4-dU$ sebesar 2,3939. Hasil tersebut dapat juga dinotasikan dengan $dU < DW < 4-dU$. Hal tersebut berarti bentuk regresi terlepas dari masalah autokorelasi.

Uji Kelayakan Model

Uji t (Parsial)

Tabel 5 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a					
Model		T	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	,730	,470		
	PAD	5,933	,000	,882	1,134
	DAU	3,208	,003	,882	1,134

a. Dependent Variable: BLJLGSG

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 diatas dapat diketahui sebagai berikut:

(1) Hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja langsung

Hasil uji t pada tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel pendapatan asli daerah senilai $0,000 < 0,05$

yang artinya H_1 diterima atau dengan kata lain variabel PAD secara signifikan berdampak terhadap belanja langsung. Hasil penelitian sejalan dengan (Rahmat, 2016) dan (Rizal, 2017) bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Hasil yang sama juga dilakukan oleh (Setiyawati, 2014) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan pada belanja langsung.

(2) Hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja langsung

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel dana alokasi umum senilai $0,003 < 0,05$ yang artinya H_2 diterima atau dengan kata lain variabel dana alokasi umum secara signifikan berpengaruh terhadap belanja langsung. Hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan (Rahmat, 2016), (Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, 2018), dan (Setiyawati, 2014) yang menghasilkan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja langsung. Penelitian yang dilakukan (Rizanda, 2013) menyampaikan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dengan belanja modal.

Uji F (Simultan)

Tabel 6 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	151430735114285	2	757153675571425	33,230	,000 ^b
	1600000000,000		800000000,000		
Residual	888635065941198	39	227855145113127		
	900000000,000		90000000,000		
Total	240294241708405	41			
	0600000000,000				

a. Dependent Variable: BLJLGSG

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa H_3 diterima atau dengan kata

lain kedua variabel berpengaruh simultan pada belanja langsung.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,794 ^a	,630	,611	15094871483 8,22840	1,739

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BLJLGSG

Tabel 7 menunjukkan nilai R² sebesar 0,630, hal ini berarti sebesar 63% belanja langsung dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Sisanya 37% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	74528839 043,620	102163557 377,432		,730	,470
PAD	1,379	,232	,615	5,933	,000
DAU	,399	,124	,333	3,208	,003

a. Dependent Variable: BLJLGSG

Berdasarkan tabel 8 maka diperoleh model persamaan regresi:

$$Y = 74528839043,620 + 1,379 X_1 + 0,399 X_2 + e$$

Model persamaan regresi diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 74528839043,620 berarti apabila variabel PAD dan DAU bernilai nol, maka belanja langsung sebesar 74528839043,620.
- Variabel PAD berpengaruh terhadap belanja langsung dengan nilai sebesar 1,379. Maka setiap terjadi penambahan variabel pendapatan asli

daerah (PAD) sebesar satu satuan, maka belanja langsung juga akan meningkat senilai 1,379.

- (c) Variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung senilai 0,399. Maka setiap penambahan variabel DAU senilai satu satuan, maka belanja langsung akan meningkat sebesar 0,399.

D. SIMPULAN

Dari hasil riset yang dilaksanakan yang menggunakan analisis regresi linear berganda tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja langsung di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2019, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja langsung di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Belanja langsung di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah secara simultan dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.
- (3) Hasil uji R^2 sebesar 0,630 atau 63% variabel belanja langsung dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti dalam penelitian ini yaitu sebesar 37%.

DAFTAR PUSTAKA

- Christia, A M., Ispriyarso, B., Studi, P. Ilmu, M, Hukum, F, & Diponegoro, U. (2019). *Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di indonesia*. 15.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iqbal, M. (2012). *Pengolahan Data dengan Regresi Linier Berganda*. Perbanas Institute Jakarta, 4, 1985–2000.
- Jambi, K., Ariansyah, M., Amir, A., & Achmad, E. (2014). *Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi* M.Ariansyah, Amri Amir, Erni Achmad I(3), 159–164.

- Made Ari Juniawan, N.P.S. S. (2018). PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Bali Indonesia 7(3), 1255–1281.
- Muhtarom, A. (2015). *Junal EKBIS /Vol. XIII/ No.1/edisi Maret 2015* | 659. XIII(1), 659_667
- Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I. W. B. (2018). *Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. 4(1), 24–33.
- Nihayah, A. Z. (2019). Pengolahan Data Penelitian Menggunakan Software SPSS 23.0. *UIN Walisongo Semarang*, 1–37.
- Permendagri. (2006). *Permendagri No.1 3/2006*. 1-73.
- Rahm at, A. (2016). *Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Langsung Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STTESIA) Surabaya*
- Rizal. Y. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 634–645. <https://doi.org/10.33059/jseb.v&il.203>
- Rizanda, P. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1–28
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah, Nurul Hidayah & Hari Setiyawati. XVIII (01), 45-58.
- Setyadhama Andryan. (2010). Ujian Kompre. 0–10.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan. (2004).